

Harmonisasi Pancasila, agama, dan negara dalam membangun identitas bangsa

Suhaillah Sobiro¹, Savira Putri Nurhalisa², Abdan Hilmy Syakuron Pertama³

^{1,2,3} Program Studi Hukum Ekonomi Syaria'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: ¹suhaillahsobiro30@gmail.com, ²saviranur658@gmail.com, ³abdansyakuron13@gmail.com

Kata Kunci:

Pancasila, agama, negara, identitas, harmonisasi.

Keywords:

Pancasila, religion, state, identify, harmony.

ABSTRAK

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki keanekaragaman etnis, budaya, bahasa, dan agama yang sangat tinggi. Keberagaman ini bukan hanya potensi kekuatan, tetapi juga dapat menimbulkan kerentanan berupa konflik identitas, diskriminasi, dan intoleransi apabila tidak dikelola dengan baik. Dalam konteks tersebut, harmonisasi antara Pancasila, Agama, dan Negara menjadi kunci utama untuk membangun identitas bangsa yang kokoh. Pancasila sebagai dasar negara berperan sebagai pedoman dalam menciptakan tatanan social yang adil, beradab,

dan inklusif. Agama berfungsi memberikan landasan moral dan spiritual yang membimbing masyarakat agar menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Sementara itu, negara hadir sebagai fasilitator yang menjamin kebebasan beragama, melindungi hak-hak warga negara, serta menjaga kerukunan antar umat beragama. Tantangan globalisasi, modernisasi, dan arus informasi transnasional sering kali memperlemah ikatan kebangsaan dengan munculnya paham ekstremisme dan sikap individualistik. Untuk menjawab tantangan tersebut, artikel ini menawarkan beberapa solusi: pertama, penguatan moderasi beragama yang menekankan sikap toleran dan penolakan terhadap kekerasan; kedua, internalisasi nilai-nilai pancasila melalui pendidikan formal dan nonformal, terutama pada generasi muda sebagai penjaga masa depan bangsa; ketiga, penguatan peran negara sebagai fasilitator dialog lintas agama dan budaya guna membangun komunikasi yang konstruktif. Dengan langkah-langkah tersebut, Indonesia dapat membangun identitas bangsa yang harmonis, inklusif, adaptif terhadap perkembangan zaman, dan tetap mampu menjaga persatuan di tengah keberagaman.

ABSTRACT

Indonesia, as an archipelagic nation, embraces vast diversity in terms of ethnicity, culture, language, and religion. This diversity represents not only a source of strength but also a potential vulnerability when mis managed, as it may lead to identity conflicts, discrimination, and intolerance. In this context, the harmonization of Pancasila, religion, and the state is essential to building a strong and sustainable national identity. Pancasila, as the state ideology, provides guidance for creating a just, civilized, and inclusive social order. Religion functions as a moral and spiritual foundation that directs society toward upholding human dignity and solidarity. Meanwhile, the state acts as a facilitator by guaranteeing freedom of religion, protecting citizens' rights, and maintaining interfaith harmony. Globalization, modernization, and the rapid flow of information often challenge national unity, giving rise to extremism, materialism, and weakened social bonds. To address these challenges, this article proposes several solutions: first, strengthening religious moderation that promotes tolerance and rejects violence; second, internalizing Pancasila values through both formal and nonformal education, particularly targeting the younger generation as future nation builders; third, enhancing the state's role as a facilitator of interreligious and intercultural dialogue to encourage constructive communication. Through these strategies, Indonesia can establish a harmonious, inclusive, and adaptive national identity, capable of withstanding the pressures of globalization while preserving unity amid diversity.



Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan tingginya keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, bahasa dan agama. Dalam kehidupan bernegara dibutuhkan norma dan budaya dari masyarakat yang akan membentuk akulturasi sebagai identitas negara dan simbol ekspresi dalam ikatan sosial sebagai konektivitas di tingkat internasional. Pada akhirnya, identitas nasional akan mewujudkan kepribadian bangsa dan negara yang dapat dilihat dalam norma, nilai, dan budaya masyarakat tersebut (Handayani & Dewi, 2021). Keanekaragaman budaya Indonesia tidak hanya merupakan kekuatan tetapi, juga dalam peluang menciptakan adanya toleransi, saling menghargai satu sama lain dan juga harmonisasi. Harmonisasi Pancasila, Agama, dan Negara di Indonesia bertujuan untuk membangun identitas bangsa yang inklusif dan berkeadaban. Sebagaimana yang tercantum pada Sila Pertama Pancasila "Ketuhanan Yang Maha Esa" mengenai ideologi keberagaman agama yang di dalamnya menekankan aspek kebebasan beragama dan juga kerukunan antar umat. Hubungan di antara ketiganya ini saling berhubungan dan juga saling mendukung, dengan Agama yang memberikan nilai spiritual (Sariputta & Najicha, 2023). Sementara itu Negara menjamin adanya kebebasan dalam beribadah. Dengan terciptanya moderasi beragama, diharapkan pula tercipta masyarakat yang harmonis, berkurang potensi konfliknya, dan persatuan akan semakin kuat di tengah keberagaman yang adil.

Pancasila akan tetap relevan sebagai ideologi bangsa dan dasar negara dalam setiap fase perkembangan zaman. Sebagai ideologi bangsa dan dasar negara Pancasila tentu tetap relevan dengan didalamnya terdapat nilai-nilai fleksibel, universal, dan mampu menyesuaikan diri dengan adanya perkembangan zaman (Faslah, 2025). Dalam menghadapi tantangan globalisasi, modernisasi, dan perubahan social, Pancasila tetap menjadi pedoman yang tidak hanya mempertahankan identitas Nasional, tetapi juga memberikan solusi untuk membangun bangsa yang maju, adil, dan berkeadaban. Pancasila bukan sekedar warisan sejarah, namun juga visi masa depan yang terus hidup dan berkembang bersama dinamika bangsa. Pancasila tidak hanya bertahan dari waktu ke waktu, tetapi juga mampu menjawab tantangan di berbagai zaman. Sebagai dasar negara dan ideology bangsa, Pancasila adalah pedoman yang mengarahkan Indonesia untuk tetap kokoh menjadi bangsa yang bersatu, maju, dan dihormati di dunia Internasional, tanpa kehilangan identitas negara (Ridwan et al., 2024)

Pembahasan

Ideologi Pancasila

Dasar negara Indonesia adalah Pancasila, sebagaimana ungkapan ide dari Ir. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Dasar negara ini sangatlah dalam maknanya bagi bangsa Indonesia, yakni sebagai cita-cita bangsa. Selain itu, Pancasila juga pemersatu rakyat dan pedoman untuk menjalankan kehidupan sehari-hari di segala bidang. Singkatnya, Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai landasan dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat di setiap bidang. Sebuah negara memerlukan pondasi bangunan dengan adanya dasar negara. Dasar negara sendiri merupakan fondasi atau pondasi yang sangat penting dalam pembentukan suatu negara. Sebagai

landasan atau prinsip dasar, dasar negara memberikan arah, tujuan, dan sistem yang akan membentuk struktur dan cara hidup suatu negara. Tanpa dasar negara yang jelas, negara tersebut akan kehilangan arah dalam menjalankan pemerintahan dan mengatur kehidupan masyarakatnya.

Oleh karena itu, dasar negara berfungsi untuk memberikan pedoman dalam menetapkan nilai-nilai dasar yang akan dijadikan acuan dalam pembuatan hukum, kebijakan, serta cara berinteraksi antarindividu dan antar institusi dalam negara. Pancasila harus menjadi dasar kehidupan bangsa Indonesia yang berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat, guna mewujudkan cita-cita dengan adanya proklamasi kemerdekaan, karena Pancasila merupakan landasan bangsa. Dari budaya bangsa ini, nilai-nilai tertinggi digali dari nilai-nilai yang abadi (Syaqina et al., 2024). Menurut Notonagoro nilai-nilai Pancasila termasuk nilai kerohanian, tetapi nilai-nilai kerohanian yang mengakui nilai material dan nilai vital. Dengan demikian nilai-nilai Pancasila yang tergolong nilai kerohanian itu juga mengandung nilai-nilai lain secara lengkap dan harmonis, yaitu nilai material, nilai vital, nilai kebenaran, nilai keindahan atau estetis, nilai kebaikan atau nilai moral, maupun nilai kesucian yang secara keseluruhan bersifat sistematis-hierarkis, dengan sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai basisnya sampai dengan sila kelima, Keadilan sosial sebagai tujuannya.

Implementasi Pancasila belum bisa terlaksana dengan baik di masyarakat Indonesia kalau masyarakat belum memahami arti Setiap sila yang memiliki makna dan prinsip untuk menjadi landasan bagi bangsa Indonesia, serta menjadi penting untuk menjalankan kehidupan bernegara. Dalam UUD 1945 sudah tertera pasal tentang ketentuan yang menunjukkan fungsi Pancasila dalam pelaksanaan kehidupan bernegara (Faizzudin, 2015: 30-37). Hal ini menunjukkan bagaimana prinsip Pancasila dapat diterapkan sesuai dengan masalah yang diangkat dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Sangat penting bagi rakyat Indonesia untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila. Akibatnya, orang Indonesia dapat mengetahui pentingnya prinsip tersebut di kehidupan sehari-hari.

Agama

Di Indonesia terdapat sebanyak enam kepercayaan agama yang diakui oleh negara yaitu, agama islam, agama Kristen, agama katolik, agama hindu, agama budha, dan agama khonghucu. Keberadaan agama dalam konteks negara Indonesia berdasarkan Pancasila memiliki peran yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mengakui adanya ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Prinsip ini menegaskan bahwa agama adalah bagian integral dari kehidupan bangsa Indonesia, dan harus dihormati serta dijunjung tinggi oleh negara.

Pancasila, sebagai ideologi dasar negara, memberikan ruang bagi kebebasan beragama yang dijamin dalam UUD 1945, khususnya pada Pasal 29 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menghargai keberagaman agama, tetapi juga menjamin adanya kebebasan dalam menjalankan ajaran agama yang diyakini oleh setiap individu.

Dalam konteks negara yang plural seperti Indonesia, keberagaman agama menjadi tantangan tersendiri. Pancasila memberikan landasan bagi negara untuk menciptakan kerukunan antarumat beragama, dengan menekankan pentingnya sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Negara harus menjadi fasilitator bagi terciptanya dialog antaragama yang konstruktif dan menghindari polarisasi atau diskriminasi berbasis agama. Hal ini penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yang merupakan nilai luhur dalam Pancasila (Hakim & Amnesti, 2022).

Namun, meskipun agama memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, negara Indonesia yang berlandaskan Pancasila juga menegaskan prinsip sekularisme dalam bentuk pemisahan antara agama dan pemerintahan. Ini berarti, meskipun agama diakui dan dihormati, negara tidak boleh mendiktekan ajaran agama kepada warganya. Negara harus menjalankan pemerintahan yang bersifat adil dan tidak memihak pada satu agama tertentu. Pancasila mengajak seluruh elemen bangsa untuk hidup berdampingan secara damai, tanpa harus ada dominasi dari satu agama terhadap agama lainnya.

Negara

utama Dalam UUD 1945 telah terbentuk sebuah prinsip yang menyatakan bahwasannya Indonesia adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Negara Indonesia memiliki ciri khas dengan Pancasila sebagai sumber pokok dan juga dasar hukum, maka dinamakan negara hukum Pancasila dengan ciri pokok terjaminnya kebebasan beragama. Identitas bangsa merupakan konsep krusial dalam upaya membina pembangunan dan persatuan dalam suatu bangsa. Identitas bangsa meliputi berbagai aspek seperti, agama, budaya, bahasa, nilai-nilai, dan simbol-simbol agama pada suatu bangsa tertentu. Identitas bangsa dan negara bukan hanya cerminan jati diri individu, tetapi juga cerminan persatuan dan solidaritas nasional segenap bangsa.

Untuk menentukan perkembangan dan persatuan suatu bangsa, identitas merupakan konsep yang mendasar. Identitas adalah konsep dasar asas yang sangat penting untuk mengarahkan pembinaan dan persatuan dalam suatu bangsa-bangsa tertentu, bukan hanya sekedar kebanggaan individu tapi juga kebanggaan nasional dan solidaritas dengan bangsa. Tidak hanya berfokus pada identitas individu tetapi juga pada persatuan dan solidaritas nasional di antara semua bangsa. Identitas ini mengingatkan masyarakat bahwa meskipun latar belakang berbeda, mereka tetap memiliki tujuan bersama untuk berkembang.

Keberagaman budaya di Indonesia terlihat dari adanya 1.300 suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah, dengan adat istiadat, bahasa, dan keseniannya masing-masing. Meskipun berbeda, budaya-budaya ini menjadi bagian dari satu identitas yang sama, yakni identitas sebagai bangsa Indonesia. Identitas nasional menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan pembangunan. Dengan memahami sejarah, budaya, dan nilai-nilai masyarakat, pemerintah dapat merancang program pembangunan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan rakyatnya. Identitas nasional yang kuat dapat meningkatkan posisi dan citra bangsa di mata dunia. Negara yang memiliki identitas khas dan konsisten akan lebih mudah dikenal dan dihormati.

Nilai, norma, dan budaya adalah dasar yang menentukan cara hidup suatu bangsa. Dalam proses akulturasi, unsur-unsur ini menyatu secara harmonis untuk menciptakan ciri khas yang khas. Identitas nasional yang terbentuk dari perpaduan nilai, norma, dan budaya ini menjadi symbol ekspresi yang mempererat ikatan social di dalam masyarakat. Dalam kehidupan bernegara, identitas tersebut menciptakan solidaritas dan kesadaran kolektif di antara warganya (Billah et al., 2023).

Negara yang menjaga jati dirinya akan lebih mudah membangun identitas yang kuat di tingkat global. Dalam era globalisasi, negara yang menonjol bukan hanya yang maju secara ekonomi, namun juga mampu menunjukkan keunikan budayanya. Ketika sebuah negara mampu mempromosikan elemen-elemen ini, negara tersebut tidak hanya dihormati karena kekuatannya, tetapi juga karena karakter uniknya. Banyak negara menggunakan budaya sebagai bagian dari strategi untuk memperkenalkan diri dan menciptakan hubungan baik dengan negara lain. Keunikan budaya suatu bangsa memberikan daya tarik yang sulit ditiru oleh negara lain (Adityo, 2022).

Harmonisasi negara melibatkan pengakuan terhadap keberagaman sebagai kekuatan, bukan kelemahan. Ketika negara mampu menghormati dan mengintegrasikan keberagaman ini ke dalam identitas nasional, hal itu menciptakan rasa inklusi dan kebanggaan bersama. Negara harus menjadi fasilitator dalam mempertemukan berbagai elemen masyarakat untuk membangun identitas yang inklusif. Identitas bangsa yang harmonis tidak hanya menjadi perekat di dalam negeri tetapi juga menjadi modal penting untuk membangun hubungan.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan moderasi beragama dapat memperkuat identitas bangsa yang inklusif dan harmonis dengan mendorong sikap saling menghormati antarumat beragama, menghindari ekstremisme, dan menumbuhkan toleransi. Moderasi beragama mengajarkan untuk menjalankan ajaran agama dengan cara yang bijaksana, tanpa memaksakan keyakinan kepada orang lain. Hal ini menciptakan ruang bagi keberagaman untuk berkembang dengan damai, memperkuat persatuan bangsa, dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang menghargai perbedaan.

Interpretasi antara nilai-nilai Pancasila dan ajaran agama dapat diidentifikasi dan dikelola dengan mencari kesamaan nilai, seperti keadilan, kemanusiaan, dan perdamaian, yang ada dalam kedua-duanya. Pancasila sebagai dasar negara mengajarkan nilai universal yang juga sejalan dengan ajaran agama, seperti menghormati hak asasi manusia dan hidup berdampingan dengan damai. Pengelolaannya dilakukan melalui dialog antaragama, pendidikan nilai-nilai kebangsaan, dan sikap saling menghargai untuk menjaga kerukunan dalam keberagaman.

Daftar Pustaka

Adityo, R. D. (2022). Penguatan Dasar Negara Melalui Penyuluhan Pancasila Pada Mahasiswa. *Devosi*, 3(2), 1–5. <https://repository.uin-malang.ac.id/11455/>

- Billah, H. U., Yunita, M. A., Pratama, M. A., & Kembara, M. D. (2023). Kesadaran Berpancasila Dalam Mempertahankan Identitas Nasional. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(2), 113–121.
- Faslah, R. (2025). *Pancasila Sebagai Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. UIN Malang Press. <https://repository.uin-malang.ac.id/24376/>
- Hakim, M. A., & Amnesti, S. K. W. (2022). Problematika Penanganan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) Pada Peradilan Tata Usaha Negara. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syari'ah*, 14(1), 125–139. <https://repository.uin-malang.ac.id/11155/>
- Handayani, P. A., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Pancasila Sebagai Dasar Negara. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 6–12. <https://doi.org/10.31316/jk.v5i1.1439>
- Ridwan, R., Dja'far, A. M., Savitri, S., & Wulandari, W. (2024). Membangun Kepemimpinan Inklusif Kaum Muda di Kota Depok. *Mitra Akademia: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 7(2), 87–95. <https://doi.org/10.32722/mapnj.v7i2.6926>
- Sariputta, A., & Najicha, F. U. (2023). Ideologi Pancasila Menjadi Pedoman Kehidupan Sehari-hari bagi Bangsa Indonesia. *Jurnal Rontal Keilmuan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 9(1), 24–29.
- Syaqina, D. W., Mutsaqofah, M. B., Yohamintin, Y., Fadhilah, H. K., & Nafasabilla, Z. (2024). The Importance of Strengthening National Identity in Education to Manage Character Building in the Alpha Generation. 2(2), 579–585.